

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)
DI KABUPATEN PESAWARAN
(Studi di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran)**

(Skripsi)

**Oleh
SONIA GUSTI MAULIZA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY-BASED WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAM (PAMSIMAS) IN PESAWARAN REGENCY (Study in Kebagusan Village Gedong Tataan Sub-district)

By

SONIA GUSTI MAULIZA

One of the government's efforts to improve rural and urban population access to water supply and sanitation facilities, and improve the value and behavior of clean and healthy life, The Government in this case the Ministry of Pekerjaan Umum and Perumahan Rakyat (PUPR) implemented the Pamsimas Programme. The purpose of this study is to describe and analyze how the implementation of the Pamsimas programme in Kebagusan Village and identify the inhibiting factors in its implementation. The results of this study indicate that the implementation of the program is assessed based on the variables of public policy implementation according to Van Meter and Van Horn in Rusli (2015: 150), namely policy standards and targets, resources, communication between implementing agencies, characteristics of implementing agencies, social conditions, economic conditions and politics, the attitude of the implementers. Based on the six variables of the program implementation, implementation has not been implemented good there are still hamlet people who still have difficulty in accessing clean water and the community is still doing open defecation. The inhibiting factors in the implementation of the program include internal obstacles, namely human resources where choosing community self-help groups or KKM chairpersons is not easy because in other program target villages, there is corruption of pamsimas funds committed by KKM chairmen and the community involved in the implementation of the majority of hamlet community programs just a water supply collection point. External barriers that directly affect the implementation of the program are socio-cultural and geographical factors of village.

Keywords: Program Implementation, PAMSIMAS

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan)

Oleh

SONIA GUSTI MAULIZA

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses penduduk perdesaaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat maka pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan program Pamsimas di Desa Kebagusan serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang dinilai berdasarkan variabel implementasi kebijakan publik menurut Van Metter Dan Van Horn dalam Rusli (2015:150), yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, sikap para pelaksana. Berdasarkan keenam variabel implementasi Program tersebut pelaksanaan program belum terlaksana dengan baik dimana masih terdapat kendala yaitu pada sasaran program dimana tidak seluruh lapisan masyarakat desa kebagusan terlayani kebutuhan air bersihnya kemudian masyarakat masih melakukan aktifitas buang air besar sembarangan dan pada kondisi sosial dimana tidak semua masyarakat mau berpartisipasi dalam pelaksanaan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program diantaranya hambatan internal yaitu sumber daya manusia dimana dalam memilih Ketua Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) merupakan hal yang tidak mudah karena di desa sasaran program yang lain ditemukan adanya korupsi dana pamsimas yang dilakukan oleh ketua KKM desa dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program mayoritas masyarakat dusun yang menjadi titik penampungan air minum saja. Hambatan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan program yaitu sosial kultural dan faktor geografis Desa.

Kata Kunci: Implementasi Program, PAMSIMAS

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)
DI KABUPATEN PESAWARAN
(Studi di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran)**

Oleh

SONIA GUSTI MAULIZA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KABUPATEN PESAWARAN**
(Studi di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

Nama Mahasiswa : **Sonia Gusti Mauliza**

No. Pokok Mahasiswa : 1516041125

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.
NIP 19710122 199512 2 001


Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.
NIP 19821212 200801 2 017

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik


Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. 

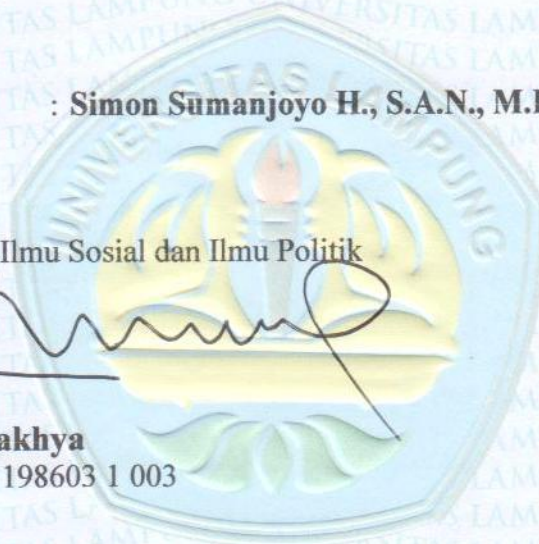
Sekretaris : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. 

Penguji Utama : Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA. 



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarifet Makhya
011 9590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Desember 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 3 Desember 2019
Yang membuat pernyataan,



Sonia Gusti Mauliza
NPM. 1516041125

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sonia Gusti Mauliza, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 9 Agustus 1996, Putri ke tiga dari Bapak Ir. Jurianto Soedardjo dan Ibu Junaida Isabet, Amd. Keb. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara, diantaranya 2 kakak (laki-laki dan perempuan) dan 1 adik perempuan.

Pemulis memulai pendidikan di taman kanak-kanak TK Dharma Wanita Sungai Langka, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 3 Sungai Langka, Gedong Tataan, Pesawaran, kemudian pada kelas 6 melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Solodiran, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah dan lulus pada tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah tahun 2008 dan mengikuti ekstrakurikuler Bolla Volly dan lulus pada tahun 2011. Pendidikan dilanjutkan di SMA Negeri 1 Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah dan mengikuti ekstrakurikuler Bolla Volly dan Paskibra dan lulus tahun 2014.

Tahun 2015, Penulis diterima sebagai Mahasiswi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui Ujian Mandiri (UM). Penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai bendahara bidang (Mikat) periode 2017/2018.

Pada bulan Januari 2018, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Pagar Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTTO

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, apa yang menjadi takdirmu tidak akan pernah melewatkanmu”

- Umar bin Khattab

“Suatu hari kita hanya akan menjadi memori bagi sebagian orang, sebab itu lakukanlah yang terbaik untuk menjadi orang baik

-Anonim

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba kita dapat membangun kesempatan untuk berhasil”

- Mario Teguh

“Hidup harus penuh dengan semangat, sebab masa depan kita terletak pada semangat hidup kita”

- Sonia Gusti Mauliza

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji Allah S.W.T. yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. yang selalu kita harapkan Syafaatnya diakhir kelak.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tuaku Bapak Ir. Jurianto Soedardjo dan Ibu Junaida Isabet, Amd. Keb

Saudariku tercinta Septi Dewi Meliana, Dessusant Astreani Jurianto, dan Saudaraku Bayu Evan Dinanda serta sahabatku yang selalu memberikan dukungan yang tiada henti

Pendidik tanpa tanda jasa

*Almamater Tercinta,
Universitas Lampung*

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alaamiin Puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah yang diberikan oleh Allah S.W.T. serta berkat doa dan restu dari orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan)”**. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing pertama yang bersedia meluangkan waktu. Terima kasih atas bimbingan, saran, semangat, motivasi serta kesabaran kepada penulis dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama penelitian sehingga penulis menjadi giat untuk lebih cepat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesehatan dan rizky selalu dilimpahkan kepada Ibu.
2. Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas bimbingan, saran, semangat, motivasi serta kesabaran kepada penulis dari awal proses bimbingan selama penelitian sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kesehatan dan rizky selalu dilimpahkan kepada Ibu.

3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.AN., M.PA. selaku dosen pembahas. Terima kasih atas bimbingan, motivasi serta segala masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesehatan dan rizky selalu dilimpahkan kepada Bapak.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP UNILA. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan dapat menjadi bekal yang berharga bagi penulis ke depannya.
7. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP UNILA yang telah memberikan pelayanan dan kelancaran administrasi sehingga penulis dapat terbantu dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Bapak/Ibu Karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Seluruh informan penelitian yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Papa dan Mama yang sangat penulis sayangi. Terima kasih telah membesarkanku. Aku sangat bersyukur memiliki kalian yang selalu memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk. Telah bekerja keras dan

berkorban demi masa depan anak-anaknya. Semoga kesehatan selalu dilimpahkan kepada kalian.

11. Bude dan Pakde selaku orang tua kedua ketika penulis ketika menempuh pendidikan Sekolah Dasar kelas 6 di Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah hingga penulis lulus SMA. Kurang lebih 7 Tahun tinggal bersama mereka. Terima kasih sudah menjadi orang tua kedua setelah Papa dan Mama. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan umur yang panjang untuk kalian.
12. Seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan dalam bentuk motivasi serta dorongan moril dan materil yang diberikan selama ini.
13. Bripda Dani Feryansyah. Terima kasih atas doa dan dukungan dalam bentuk motivasi serta dukungan moril dan materil yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih telah menemani setengah perjalanan penulis dalam menggapai gelar sarjana, sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis selama menjalani proses kuliah.
14. Bapak Yaman dan Ibu Sri selaku induk semang dan teman-teman KKN yang sudah seperti saudara. Miftah, Futra, Lucky yang jahil dan suka gangguin pas ada kesempatan dan nakut-nakutin kalau mau ke kamar mandi. Melani dan gita yang suka bangun siang jam 9 lebih. Riska yang rajin sering bantu Ibu Sri masak. Terima kasih telah memberikan pelajaran yang sangat berharga selama 40 hari. Pengalaman yang tidak akan pernah penulis lupakan.
15. Wanita seperjuangan penulis, sahabat penulis Wiwik Sukatmi SSA yang hampir dibilang kembar karena kalau kemana-mana selalu berdua yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, canda dan tawa selama kurang lebih 4 tahun.

Semoga selalu terjalin hubungan persaudaraan kita. Terima kasih atas kebahagiaan, keceriaan, dan kebersamaan selama kuliah di Universitas Lampung.

16. Sahabat – sahabat penulis yang pisahkan oleh jarak dan waktu Agatha Ari Herawati, Agnes Putri Puryaningsih, Agustina Rosa Iriani, Gading Rahmawan Widodo, Nina Apriliani Sari, Serlin Oktuari, Sinta Maharani Welerubun. Meskipun kita berbeda-beda agama, terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik, pengertian dan selalu bisa menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah sejak kelas 9 di bangku SMA sampai sekarang tidak pernah terputus komunikasinya. Terima kasih atas kebahagiaan, keceriaan, dan kebersamaan selama bersekolah di SMA Negeri 1 Jogonalan. Semoga kita bisa berkumpul seperti dulu walau hanya sebentar.
17. Sahabat seperjuangan penulis Voni Leorna dan Desa Rapanca. Terima kasih atas kebahagiaan, keceriaan, dan kebersamaan selama kuliah di Universitas Lampung.
18. Saudari sepupuku Chertio Aldini, Putri Anindita, Intan Trianisa. Terima kasih banyak untuk persaudaraan yang selalu terjaga dan tidak pernah putus walaupun orang tua kita terkadang sering berantem satu sama lain tapi kita tidak pernah ikut campur karena kita selalu damai-damai aja. Terima kasih telah membantu dalam proses skripsi ini.
19. Teman-teman ATLANTIK (ANE 2015) khususnya Kelas A (Kartika, Besta, Berza, Shinta Arista, Bayu, Kenda, Aldino, Bima, Rika dan Ria (si kembar), tiara, apriyana, cindi, maulidya, putri aisyah, lulu, bobby, rifky, dan lain-lain tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas persahabatan, doa,

dukungan serta kebersamaan selama proses perkuliahan. Semoga kita sukses semua dan tak terlupakan. Aamiin.

20. Kakak-kakak Senior Gelas Antik (ANE 2014) terutama di Mikat (Mbak Tije, Bang Roby, Bang Fatra, Mba Isti, Mbak Suci, Mbak Andra, Bang Rhydo) Terima kasih pengalaman yang berharga selama berorganisasi dan segala bantuan yang diberikan selama penulis berkuliah.
21. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, kenangan dan juga teman.
22. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.

Bandar Lampung, 3 Desember 2019
Penulis,

Sonia Gusti Mauliza

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Tentang Implementasi Program.....	12
1. Pengertian Implementasi	12
2. Pengertian Program	13
3. Model Implementasi.....	14
C. Faktor Penghambat Implementasi.....	24
D. Tinjauan Tentang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)	26
E. Tinjauan tentang Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (<i>Community Driven Development</i>)	27
F. Kerangka Pemikiran.....	31
III. METODE PENELITIAN	35
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	35
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Wawancara (<i>Interview</i>)	39
2. Observasi.....	39
3. Dokumentasi.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	40

1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	40
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	41
3. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing</i>)	41
G. Teknik Keabsahan Data	42
1. Kredibilitas Data (<i>Credibility</i>)	42
2. Teknik Pengujian Keteralihan Data (<i>Transferability</i>).....	44
3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (<i>Dependability</i>)	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Profil Singkat Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan	45
2. Profil Singkat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran	49
3. Profil Singkat Program Pamsimas di Kabupaten Pesawaran	51
B. Hasil Penelitian	53
1. Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Pesawaran (Studi di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan).....	53
2. Faktor Penghambat Implementasi Program	77
C. Pembahasan.....	79
1. Implementasi Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Pesawaran (Studi di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan.	80
2. Program Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Program Pamsimas	92
3. Faktor Penghambat Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.....	95
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan di Desa Kebagusan Tahun 2017.....	5
2. Penelitian Terdahulu	10
3. Informan Terkait Implementasi Program Pamsimas.....	39
4. Jumlah RT berdasarkan Pembagian Wilayah Di Desa Kebagusan.....	48
5. Jumlah KK Berdasarkan Status Pendidikan.....	48
6. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan di Desa Kebagusan Tahun 2017.....	72
7. Realisasi Kegiatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	81
8. SDM dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	84
9. Peran Agen Pelaksana Program Pamsimas	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah Kasus Diare Berdasarkan Data Puskesmas di Kabupaten Pesawaran Tahun 2016	4
2. Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut Van Metter dan Van Horn .	22
3. Kerangka Penelitian	34
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kebagusan.....	49
5. Kegiatan Sosialisasi Program.....	56
6. Kegiatan Pelatihan KKM	57
7. Konstruksi Bangunan Pamsimas.....	57
8. Keberlanjutan Pemanfaatan Sarana Air Minum	58
9. Kegiatan Pemicuan STBM, Pengambilan Sampel Kadar Air, dan Promosi Kesehatan CTPS	59
10. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Program Pamsimas	63
11. Sumber Daya Finansial Program Pamsimas desa Kebagusan	66
12. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Program Pamsimas	68

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Menurut Sadyohutomo dalam Aslamiyah, dkk (2014 : 91) air bersih merupakan kebutuhan vital setiap manusia sehingga ketersediaannya menentukan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Jika pemenuhan kebutuhan manusia akan air tanpa mengesampingkan kualitas air tidak terpenuhi maka dapat berdampak pada kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia, ketersediaan air bersih yang belum merata menjadi isu penting karena mempengaruhi segala aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap air bersih juga dipercaya sebagai cara untuk memutus rantai kemiskinan. Sayangnya, peningkatan ekonomi Indonesia selama 20 tahun terakhir tidak dibarengi dengan pemerataan akses air bersih.

Sebanyak 33,4 Juta penduduk kekurangan air bersih dan 99,7 Juta jiwa kekurangan akses untuk fasilitas sanitasi terbaik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan capaian akses air bersih yang layak saat ini di Indonesia mencapai 72,55% (www.suara.com, diakses pada 18 Maret 2019, pukul 20.00 WIB).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target *Universal Access* (UA) Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 yaitu 100% akses air minum dan sanitasi. Sejalan dengan itu, Pemerintah melaksanakan program *Water Supply and Sanitation for Low Income Community* (WSLIC) yang kemudian dikenal sebagai Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Program Pamsimas merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan pelaksana di daerahnya Dinas Cipta Karya yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan program tersebut. Dinas Cipta Karya sendiri sebagai pelaksana pembangunan secara fisik bangunan penampungan air minum dan sanitasi dan puskesmas sendiri dibawah pengawasan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan untuk merubah kebiasaan dan perilaku masyarakatnya melalui kegiatan pemicuan bukan dari fisik dalam pembangunannya seperti yang dilakukan Dinas Cipta Karya. (Buku Pedoman Umum Pamsimas, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai pelayanan publik yang mendasar, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal tersebut, program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non fisik

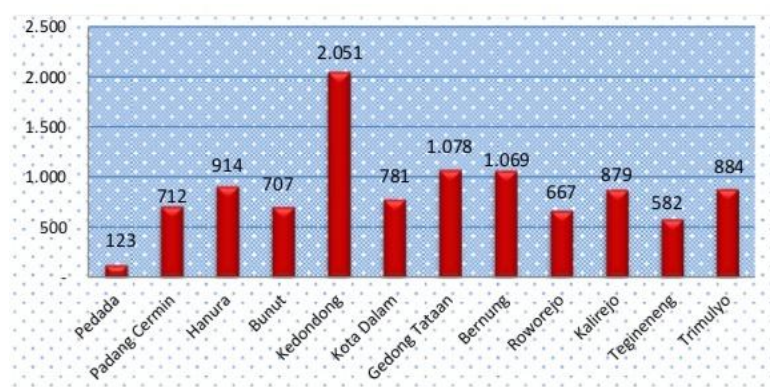
dalam bentuk manajemen dukungan teknis dan pengembangan kapasitas (Pedoman Umum Pamsimas, 2016).

Program Pamsimas dimulai pada Tahun 2008, dimana sampai dengan Tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin pedesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 12.000 desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota melalui pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi. Program Pamsimas dilanjutkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 (Program Pamsimas III).

Pembangunan yang berbasis pedesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Pembangunan diperlukan untuk merubah suatu kondisi dan situasi yang masih dirasa kurang baik seperti sekarang ini menuju kearah yang lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan khalayak. Program Pamsimas ini hadir tentu dengan tujuan awalnya adalah untuk membantu masyarakat di desa dalam berbagai kebutuhan air untuk aktivitas kehidupan sehari-harinya serta kondisi sanitasi yang mempengaruhi kesehatan lingkungan tempat tinggal. Program ini tidak hanya untuk desa yang tertinggal akan tetapi untuk semua desa yang memang membutuhkan sarana air ataupun kekurangan akses air di desa mereka yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Secara nasional, capaian akses air minum aman sampai akhir tahun 2016 sebesar 71,14 persen, sedangkan untuk sanitasi layak sebesar 76,37 persen. Akses sanitasi layak Provinsi Lampung sejak tahun 2015 mengalami peningkatan, akan tetapi masih tergolong rendah. Pada tahun 2015 sebesar 44,83%, tahun 2016 sebesar 58,58% dan tahun 2017 sebesar 52,89%. (Badan Pusat Statistik, 2017). Di Kabupaten Pesawaran, penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak sebanyak 244,747 jiwa atau sebesar 56,76% (Profil Kesehatan Kabupaten Pesawaran, 2016).

Kabupaten Pesawaran mendapatkan Program Pamsimas III pada tahun 2017. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 195/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu kabupaten sasaran Program Pamsimas. Program Pamsimas merupakan salah satu yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi serta meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Berikut merupakan gambar diagram jumlah kasus diare di Kabupaten Pesawaran tahun 2016.



Gambar 1. Jumlah Kasus Diare Berdasarkan Data Puskesmas di Kabupaten Pesawaran Tahun 2016

(Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2017)

Berdasarkan data diatas, jumlah kasus diare terbanyak berada di wilayah kerja Puskesmas Kedondong yaitu sebanyak 2.051 kasus dan terendah berada di wilayah kerja Puskesmas Pedada yaitu ada 123 kasus. Untuk wilayah Gedong Tataan sendiri menjadi peringkat kedua kasus diare terbanyak di Kabupaten Pesawaran yaitu sebanyak 1.078 hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena masih tergolong tinggi. Menurut Sander dalam Ni Ketut, dkk (2014:134) ada beberapa faktor yang berkaitan dengan penyakit diare yaitu tidak memadainya penyediaan air bersih, air tercemar oleh tinja, kekurangan sarana kebersihan, pembuangan tinja yang tidak higienis, kebersihan perorangan dan lingkungan yang jelek, serta penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak semestinya.

Salah satu desa yang menjadi sasaran lokasi untuk program Pamsimas di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ialah Desa Kebagusan. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Kebagusan mayoritas masih tergolong menengah kebawah. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Kebagusan. Berikut ini merupakan data yang didapatkan oleh peneliti terkait tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kebagusan:

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan di Desa Kebagusan Tahun 2017

Dusun	Miskin	Menengah	Kaya
Sidototo	107	54	18
Way Layap II	86	43	14
Kebagusan II	213	107	36
Way Layap I	172	86	29
Kebagusan I	103	51	17
Way Berulu	229	114	38
Kampung Sawah	102	51	17
Triharjo	81	40	13
Total	1093	546	182

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Kebagusan tergolong menengah kebawah atau miskin dengan total 1093 KK. KK miskin terbanyak berada di dusun Way Berulu dengan jumlah 229 KK. Untuk Dusun Sidototo yang mendapat lokasi bantuan air Pamsimas berjumlah 107 KK miskin.

Kemudian berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti di beberapa rumah masyarakat di Desa Kebagusan, rata-rata masyarakat memiliki sumur gali atau sumur bor masih kesulitan dalam memperoleh air bersih dan sebagian masyarakat yang tidak memiliki sumur melakukan aktifitasnya yang berhubungan dengai air di sungai terdekat.

Masyarakat desa Kebagusan mendapat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Pada saat musim kemarau, sumur gali yang digunakan masyarakat desa Kebagusan mengalami kekeringan. Kesulitan yang timbul akibat keterbatasan air minum yang layak dapat langsung dirasakan dan berdampak pada kesehatan dan produktivitas masyarakat. Masyarakat terpaksa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air di sungai-sungai terdekat. Perilaku buang air besar sembarangan di sungai tentunya membuat kondisi lingkungan menjadi tidak sehat. Perilaku buang air besar sembarangan ini juga merupakan kebiasaan yang sulit dihilangkan. Dibutuhkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Solusinya adalah dengan menghadirkan sebuah Program Pamsimas, dimana pemerintah mengeluarkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Desa Kebagusan. Namun pada kenyataan di lapangan, tidak semua masyarakat Desa Kebagusan dapat merasakan manfaat program ini dan masyarakat masih melakukan aktifitas buang air besar sembarangan.

Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Fitrah selaku Ketua Keswadayaan Masyarakat (KKM) di Desa Kebaguan, bahwa masih ada dusun yang kesulitan mendapat air bersih tidak bisa menikmati kehadiran program ini dan masih ada warga yang buang air besar sembarangan di Sungai terdekat. Padahal program Pamsimas ini hadir untuk membantu permasalahan air bersih dan merubah kebiasaan buang air besar sembarangan di Desa Kebagusan. (Observasi dan Wawancara di Desa Kebagusan, Pada Tanggal 23 Maret 2019 pukul 16.00 WIB).

Program Pamsimas hadir tentunya untuk menyelesaikan persoalan dibidang air minum dan sanitasi. Keberhasilan atau kegagalan program ini sangat ditentukan oleh pelaksana program, apabila pelaksana program sudah mampu melaksanakannya dengan baik, diharapkan sasaran dari program ini akan dapat terakomodir, karena sebuah program dapat dikatakan baik bukan hanya dilihat dari bentuk program yang dikeluarkan, tetapi apakah program itu sudah mampu menjawab sesuai kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu, implementasi merupakan suatu tahapan yang penting dalam kebijakan publik.

Suatu kebijakan telah memiliki tujuan yang baik, namun dalam pengimplementasiannya terjadi kegagalan maka tujuan dari program tersebut tidak akan tercapai. Begitu juga dengan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ini, walaupun program ini memiliki tujuan yang baik, namun tidak diimplementasikan dengan baik maka program ini tidak akan berhasil dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menggunakan model implementasi Van Metter dan Van Horn. Model implementasi digunakan untuk

mengetahui bagaimana Program Pamsimas diimplementasikan sehingga memberikan gambaran pada sebuah pencapaian tujuan. Melihat pada permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan Program Pamsimas di Desa Kebagusan seperti ketepatan sasaran program dimana masih ada dusun yang masih mengalami kekurangan air bersih, maka terdapat kesesuaian dengan indikator dalam model implementasi Van Metter dan Van Horn dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

2. Teridentifikasinya faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik yang terkait dengan kebijakan publik khususnya implementasi program.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan kepada para pelaksana Program Pamsimas khususnya di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sehingga menjadi umpan balik (*feed back*) dalam implementasi Program Pamsimas dan juga menjadi acuan bagi organisasi-organisasi lain dalam mengimplementasikan program-program yang akan dilaksanakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis menemukan penelitian dengan tema yang sama dari peneliti terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Chika Chaerunnissa (2014)	Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Desa Legok dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung)	Bentuk partisipasi masyarakat nampak dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Dalam Tahap Perencanaan, partisipasi masyarakat Program Pamsimas berupa sumbangan pikiran. Pada Desa Legok lebih banyak memberikan usul, saran dan kritik daripada Desa Tambakserang. Pada Tahap Pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa Tambakserang sebagian besar berupa uang dan tenaga, sedangkan di Desa Legok paling banyak berupa tenaga, karena masyarakat di Desa Legok banyak yang berpenghasilan rendah.	penelitian yang dilakukan oleh Chika Chaerunnissa membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Pamsimas di Kabupaten Brebes sedangkan penulis membahas mengenai implementasi Program Pamsimas di desa Kebagusan Kab. Pesawaran

Nora Maharani (2015)	Hubungan Pelaksanaan Program Pamsimas dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat (Studi di Desa Merpang Kecamatan Kecamatan Agung Kabupaten Oku Selatan Sumatera Selatan)	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perogram Pamsimas sudah menjalankan indikatornya yaitu dilakukan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat, sudah dibangun jamban sehat umum, dan sudah dialirkarkan air bersih, namun ada yang belum dicapai dalam Pelaksanaan Program Pamsiams yaitu belum terdapatnya bak sampah umum dan belum memenuhi tingkat kepuasan masyarakat terkait penyediaan air minum karena masih ada kendala pada musim kemarau.	Penelitian yang dilakukan oleh Nora Maharani membahas mengenai Hubungan Pelaksanaan Program Pamsimas dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Desa Merpang Kecamatan Agung Kabupaten Oku Selatan Sumatera Selatan sedangkan penulis membahas mengenai implementasi program pamsimas.
Jamzi Mordani (2014)	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	Pemberdayaan masyarakat melalui program Pamsimas, indikator yang digunakan dalam melaksanakan program dikategorikan cukup mampu diberdayakan oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat dengan fasilitator dan pemerintah desa serta masyarakat telah berupaya untuk melakukan pemberdayaan dimulai dari pembangunan konstruksi dan sosialisasi ke masyarakat lainnya yaitu pembangunan sarana depot air minum dan sanitasi ke tempat-tempat umum.	Penelitian yang dilakukan oleh Jamzi Mordani membahas mengenai Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sedangkan penulis membahas mengenai Implementasi Program Pamsimas di desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2019)

Tabel 2 menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Program Pamsimas. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan lokasi yang sama, dan penelitian ini berfokus pada implementasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten

Pesawaran dengan tujuan untuk memperoleh diskripsi implementasi mengenai program tersebut serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul.

B. Tinjauan Tentang Implementasi Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (*eksekutif*). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi (Riggs, 2005:54).

1. Pengertian Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:65).

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2. Pengertian Program

Program yang baik menurut Tjokromidjojo dalam Skripsi Ruari (2017) harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tujuan yang dirumuskan secara jelas
- b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin
- d. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut
- e. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri
- f. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Ratmiko, 2005:4).

3. Model Implementasi

Implementasi kebijakan publik adalah sesuatu yang kompleks dan melibatkan berbagai bentuk kegiatan, berbagai aktor atau pihak yang terkait dengan lingkungan atau konteks dimana kebijakan itu hendak diterapkan untuk mencapai tujuannya. Menurut Rusli (2015:85) terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik yang berasal dari sisi internal maupun eksternal, dari sisi atas maupun bawah, dari sisi horizontal ataupun vertikal, baik yang Nampak (*tangible*) atau yang tidak nampak (*intangible*), maupun yang bentuk dan sifatnya langsung atau tidak langsung.

Keseluruhan faktor tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam proses pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor tersebut disederhanakan dalam bentuk model untuk melihat bagaimana faktor-faktor pengaruh tersebut berperan dalam pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan

merupakan sebuah alat atau cara untuk mencapai sebuah tujuan sehingga ketika kegiatan sudah dilakukan bukan berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil dengan baik.

Keberadaan berbagai model implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan tujuan sebuah kebijakan atau program bukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan telah mencapai tujuannya. Tujuan tersebut adalah semacam panduan atau petunjuk yang harus dituju pelaksana atau stakeholders kebijakan. Keberadaan berbagai model implementasi kebijakan atau program digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan itu diimplementasikan sehingga memberikan gambaran pada sebuah pencapaian tujuan terutama mengenai hasil dan manfaatnya. Berbagai model implementasi kebijakan publik tersebut dijelaskan oleh berbagai ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Model George C. Edwards III

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2008:149), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya

sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksanaan atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Edward III dalam Agustino (2008:151) menyatakan bahwa hal ini meliputi empat komponen, yaitu:

Staff, Informasi, Wewenang dan Fasilitas.

3) Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari program, dalam hal terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan atau program, sedangkan apabila implementor atau pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi atau pelaksanaan program juga menjadi tidak efektif. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III dalam Agustino (2008:152) adalah: Pengangkatan Birokrat dan Insentif.

4) Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2008:153), dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik

adalah: melakukan Standar Operating Procedure (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatankegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitasaktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

b. Model Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam Agustino (2012:154), ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas isi kebijakan (*Content of Policy*) dan konteks kebijakan (*Context of Policy*). Ide

dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Isi kebijakan (*Content of Policy*) tersebut mencakup hal-hal berikut:

a) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan.

c) Derajat perubahan yang ingin dicapai

Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d) Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e) Pelaksana Program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f) Sumber daya yang digunakan

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Sementara itu, konteks kebijakannya adalah :

a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

b) Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya.

c) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Hal ini penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan melihat sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Melihat secara detail, model Grindle mempunyai keunikan yaitu model ini terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementator, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.

c. Model Donal S. Van Metter dan Carl E. Van Horn

Menurut Van Metter Dan Van Horn dalam Rusli (2015:150) ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan Sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari sebuah kebijakan atau program yang dijalankan. Menurut Suharno (2013:146), jika standar dan sasaran tidak terukur dengan jelas akan menimbulkan multiinterpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

2) Sumber Daya

Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik dan dapat menjelaskan nilai yang efisien. Menurut Edward III (Rusli:102) bahwa kekurangan sumber daya akan berakibat pada ketidak efektifan penerapan kebijakan.

3) Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi ditetapkan sebagai acuan, misalnya sering dilaksanakan rapat-rapat rutin secara berkala dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan agar dapat mendukung komunikasi antar institusi yang berkaitan dengan program atau kebijakan dengan kelompok sasaran yang mampu memahami serta bertanggungjawab atas program yang dilaksanakan. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:144) mengatakan bahwa komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi. Maka asumsinya kesalahan-kesalahan sangat kecil untuk terjadi.

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana menunjuk pada seberapa besar daya dukung organisasi yang mendapat dukungan dari struktur (sumber daya) organisasi, nilai-nilai (budaya) yang berkembang dalam organisasi, hubungan dan interaksi komunikasi internal organisasi dalam birokrasi.

5) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

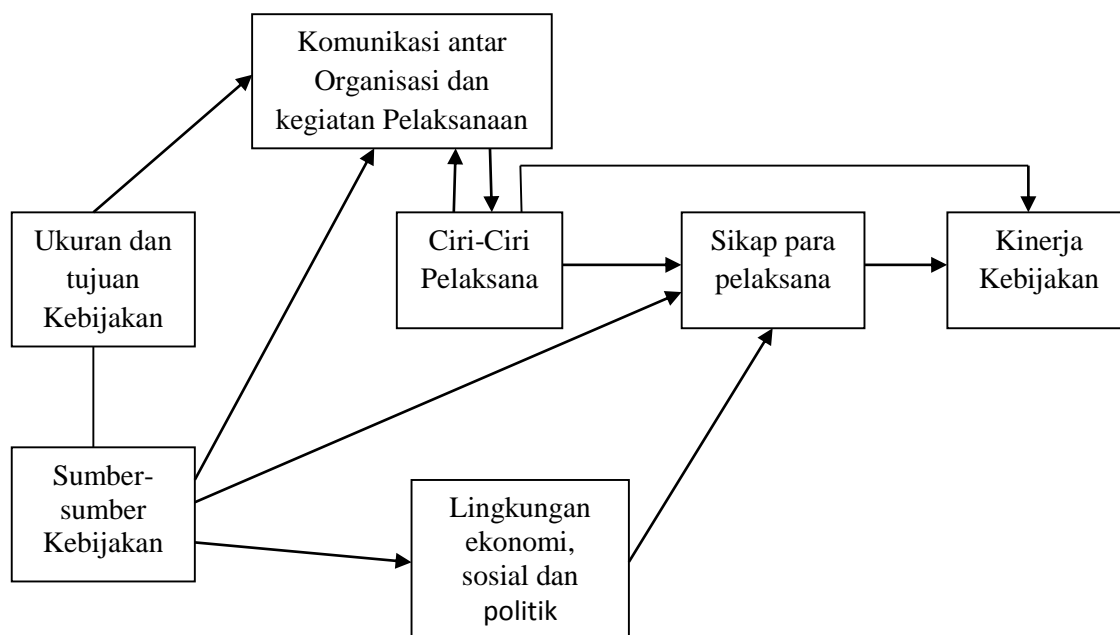
Variabel ini mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dan ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Suharno (2013:147) dalam implementasi sebuah kebijakan atau program, ketiga variabel harus dapat mencakup hal sebagai berikut, yaitu:

- a) Dukungan sumber daya ekonomi lingkungan.
- b) Dukungan kelompok kepentingan bagi implementasi kebijakan atau program, karakteristik para partisipan, mendukung atau menolak serta opini publik yang ada dilingkungan.
- c) Dukungan elit politik dalam implementasi kebijakan atau program.

6) Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Hal ini menjadi penting karena sependapat dengan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:143) menjelaskan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Menurut Suharno (2013:147-148) mengatakan bahwa, sikap para pelaksana ini mencakup tiga hal penting yaitu:

- a) Antusias dan respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan
- b) Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan, dan
- c) Intensitas sikap para pelaksana yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut Van Metter dan Van Horn

Sumber : Van Metter dan Van Horn dalam Rusli (2015:107)

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai model implementasi kebijakan diatas, maka peneliti ingin melihat bagaimana implementasi program Pamsimas di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran melalui enam variabel keberhasilan implementasi Van Metter dan Van Horn, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, dan Sikap Para Pelaksana. Alasan peneliti menggunakan model Van Metter dan Van Horn

adalah karena model implementasi Van Meter dan Van Horn termasuk dalam model implementasi kebijakan *top-down*. Hal ini juga dijelaskan di dalam buku Agustino (2008:141).

Model implementasi kebijakan *Top-down* menurut Agustino bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan pemerintah yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator atau birokrat pada level bawahnya. Inti pendekatan *Top-down* melihat sejauh mana tindakan yang diambil para pelaksana kebijakan (administrator atau birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan penelitian ini, Program Pamsimas merupakan suatu program yang bersifat *Top-down approach* (pendekatan atas ke bawah), yang mana pendekatan implementasi program tersebut dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat, yakni dalam penelitian ini program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dibuat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 195/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu kabupaten sasaran Program Pamsimas. Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn memberikan enam variabel untuk melihat gambaran tentang Implementasi Program Pamsimas di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan mengukur bagaimana kebijakan atau program tersebut dilaksanakan.

C. Faktor Penghambat Implementasi

Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Turner dan Hulme dalam Pasolong (2016:59), implementasi kebijakan memiliki berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik yaitu :

1. Hambatan dari dalam (faktor internal), dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan.
2. Hambatan dari luar (faktor eksternal), dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

Menurut Bambang Sunggono dalam Salbiah (2015:181), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu :

1. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan di implemtasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sanagt berarti. Keempat, timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat disebabkan karena adanya kekurangan-kekurangan dalam hal sumber daya pembantu, seperti waktu, biaya, dan manusia.

2. Informasi

Para pemegang peran atau pelaksana dalam suatu kebijakan mempunyai informasi yang perlu atau berkaitan untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jika informasi yang dibutuhkan tidak ada maka akan adanya gangguan komunikasi dalam implementasi kebijakan.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan.

4. Pembagian Potensi

Hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau pembatasan yang kurang jelas.

Menurut James Anderson dalam Salbiah (2015:182), faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik yaitu :

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
2. Anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau melawan hukum.

4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

D. Tinjauan Tentang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

Program Pamsimas merupakan kegiatan di bidang air minum dan sanitasi yang ditunjukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran perkotaan dan dilaksanakan secara berbasis masyarakat. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat pinggiran kota.

Tujuan Program Pamsimas:

1. Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat
2. Meningkatkan jumlah warga yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan

Pamsimas atau dikenal dengan *Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities* (WSLIC-3), merupakan kelanjutan program WSLIC-2 maupun WSLIC. Program Pamsimas merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan

penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan (pedoman umum program pamsimas : 2016).

Indikator Program Pamsimas yaitu:

1. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Pelayanan Sanitasi
 - a. Masyarakat berhenti buang air besar sembarangan.
 - b. Masyarakat menerapkan perilaku cuci tangan pakai sabun.
2. Penyediaan Sarana Air Minum atau Sanitasi Umum
 - a. Sarana air minum yang berfungsi, dimanfaatkan serta memenuhi tingkat kepuasan masyarakat.
 - b. Sarana air minum yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat.

Dalam menentukan desa yang dinilai layak menjadi lokasi sasaran program Pamsimas diantaranya sebagai berikut:

- a. Indeks kemiskinan desa/kelurahan yang tinggi
- b. Desa/kelurahan memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih/air minum dan sanitasi
- c. Desa/kelurahan dengan tingkat penyakit diare atau penyakit terkait dengan air yang tergolong tinggi
- d. Desa/kelurahan yang belum mendapatkan program sejenis di 2 tahun terakhir.

E. Tinjauan tentang Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community Driven Development*)

Pembangunan berbasis masyarakat (*Community Driven Development*) merupakan sebuah pendekatan dalam melaksanakan pembangunan dengan meningkatkan

inisiatif masyarakat untuk berperan aktif sebagai pelaku atau pengelola, dimana masyarakat yang pada awalnya hanya menjadi sasaran dari sebuah perubahan digiring untuk menjadi pelaksana dari keseluruhan proses pengembangan masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat dapat dilakukan melalui upaya memperkuat dan memberikan pendanaan bagi kelompok masyarakat, memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi, meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat yang dilakukan melalui reformasi kebijakan dan kelembagaan.

Community Driven Development (CDD) merupakan sebuah program yang dirancang untuk menghimpun inisiatif dan partisipasi masyarakat. Menurut Tanaka dalam Risna dan Rudi (2016:66) *Community Driven Development* (CDD) merupakan pengembangan dari *Community Based Development* (CBD) atau dikenal dengan pengembangan berbasis masyarakat. Jika CBD memfokuskan pada berbagai cara dan tindakan berbasis masyarakat dalam proses program dengan penekanan pada cara-cara dan sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat. Maka CDD merupakan upaya terorganisir dengan pola pembangunan yang mencakup aktivitas yang lebih luas. CDD memiliki karakter yang sesuai dengan tujuan pemberdayaan, karakteristik utama dalam CDD selain secara aktif melibatkan masyarakat dalam merencanakan, manajemen, dan melaksanakan proyek. CDD memiliki penekanan pada pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya di hampir semua tahap program.

Terdapat 5 (lima) karakteristik utama CDD menurut *World Bank* dalam Risna dan Rudi (2016:67) yang akan memberikan penjelasan bagaimana kedudukan

masyarakat dalam sebuah program, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun keterlibatan penuh dari masyarakat sehingga mereka memiliki ketrampilan dalam mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan CDD berupaya melibatkan organisasi berbasis komunitas atau kelembagaan dan perwakilan dari masyarakat yang dianggap paling mengetahui kondisi dalam masyarakat disana. Fokus terhadap komunitas ini memiliki arti bahwa berkarakteristik penting dari proyek CDD adalah penerima manfaat atau penerima hibah dari implementasi adalah agen masyarakat.
2. Kegiatan CDD melalui organisasi berbasis masyarakat atau lokal bertanggungjawab untuk merancang dan merencanakan subproyek secara partisipatif.
3. Karakteristik utama proyek CDD adalah bahwa sebagai sebuah upaya pemberdayaan, program CDD melatih masyarakat agar mampu melakukan akses, pengendalian dan pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini masyarakat diberikan wewenang untuk mengelola program sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai.
4. Masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan subproyek. Seringkali partisipasi masyarakat datang langsung dalam bentuk tenaga kerja atau dana. Namun demikian, masyarakat juga dapat berkontribusi pada subproyek secara tidak langsung dalam bentuk manajemen dan pengawasan kontraktor atau operasi dan pemeliharaan infrastruktur ketika selesai.

5. Unsur pemantauan dan evaluasi berbasis masyarakat telah menjadi karakteristik subproyek CDD. Paling sering dilakukan adalah alat akuntabilitas sosial seperti pemantauan partisipatif, kartu penilaian masyarakat dan sistem penanganan keluhan yang memungkinkan masyarakat untuk memastikan akuntabilitas penerapan CDD.

Menurut Theresia Aprilila, dkk (2014) pembangunan berbasis masyarakat secara sederhana diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Karena itu, pembangunan berbasis masyarakat seharusnya pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Potensi sumber daya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai usaha mengubah sumber daya yang bersifat potensial menjadi aktual. Pada dasarnya pemanfaatan potensi sumber daya masyarakat ini harus diartikan sebagai usaha memanfaatkan atau memobilisasi sumber daya yang sebelumnya belum pernah disentuh, tetapi juga dapat berarti meningkatkan daya manfaat atau optimalisasi sumber daya yang sebelumnya belum pernah digarap. Untuk memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat diperlukan kualitas manusia yang memiliki ketrampilan yang inovatif. Sehingga sumber daya manusia merupakan sumber daya pembangunan dalam mencapai kesejahteraan. Sumber daya manusia (*human capital*) menempati kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan sebagai pengelola dan pelaku pembangunan yang dapat memberikan manfaat dan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Menyimpulkan berbagai perspektif para ahli, pembangunan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan meningkatkan inisiatif masyarakat untuk berperan aktif sebagai pelaku atau pengelola dimana masyarakat yang pada awalnya hanya menjadi sasaran dari sebuah perubahan digiring untuk menjadi pelaksana.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target *Universal Access* (UA) Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 yaitu 100% akses air minum dan sanitasi. Sejalan dengan itu, Pemerintah melaksanakan program *third water supply and sanitation for low income community* (WSLIC) yang kemudian dikenal sebagai program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yaitu salah satu program nasional yang diselenggarakan secara terstruktur oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan akses penduduk perdesaan dari periurban (pinggiran kota) terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Program Pamsimas dimulai pada Tahun 2008, dimana sampai dengan Tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat

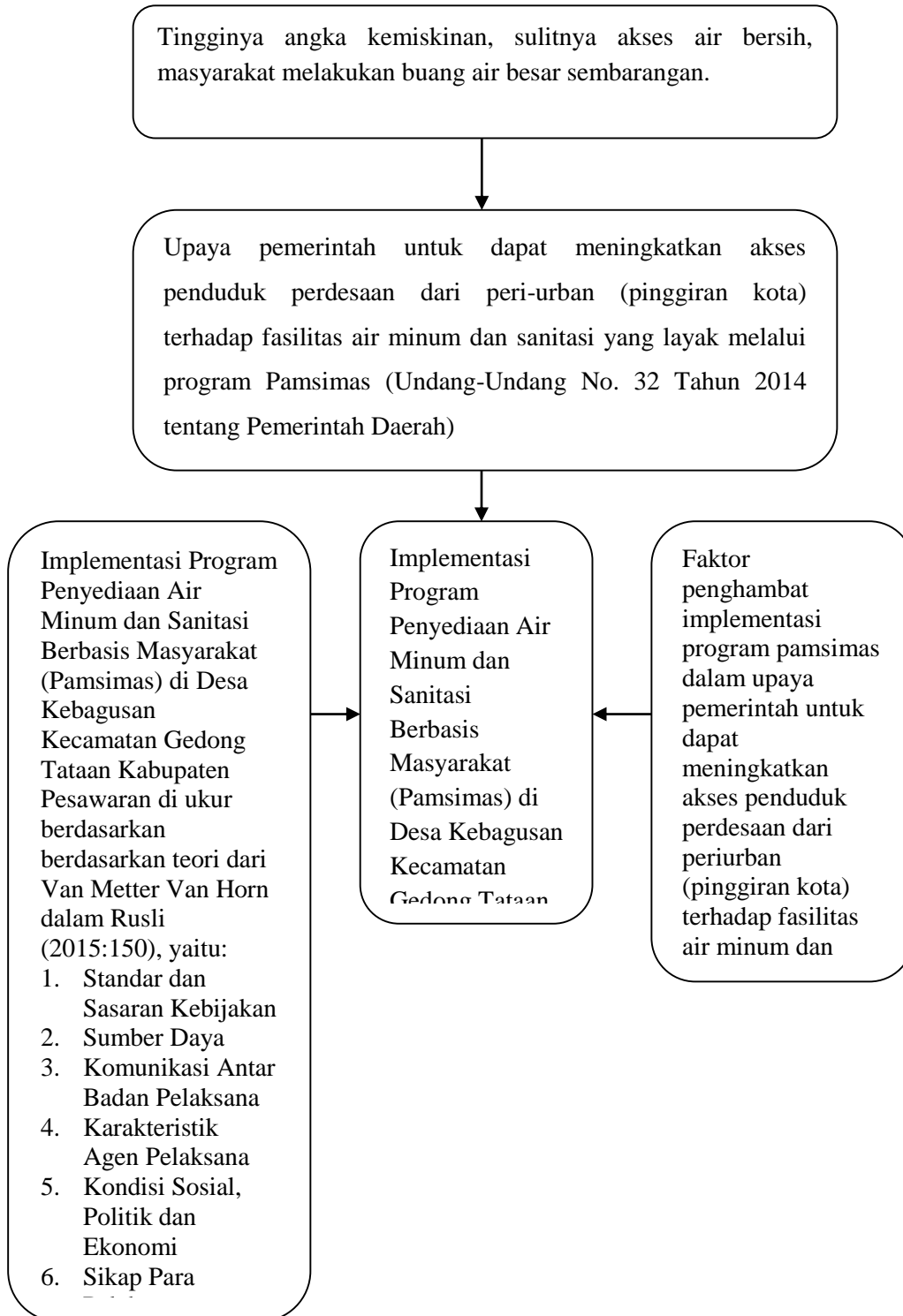
sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi. Program Pamsimas adalah program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan pelaksana di daerahnya Dinas Cipta Karya yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan program tersebut.

Salah satu sasaran Program Pamsimas ialah desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan. Program tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih terutama masyarakat desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan yang dimana daerahnya masih sulit mendapatkan air bersih terlebih saat musim kemarau. Namun pada kenyataan di lapangan, tidak semua masyarakat desa Kebagusan dapat menikmati kehadiran program ini. Berdasarkan wawancara awal dengan pengelola program, bahwa masih ada dusun yang kesulitan mendapat air bersih tidak bisa menikmati kehadiran program ini. Padahal program Pamsimas ini hadir untuk membantu permasalahan air bersih di desa Kebagusan. Permasalahan lain yang didapat dari wawancara di desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan adalah dimana Dinas Kesehatan kabupaten pesawaran yang membantu mengelola program ini hanya melakukan pengecekan sekali saja yaitu pada tahun 2017. Sedangkan masyarakat tidak mengetahui apakah kadar air yang digunakan dari penampungan air sampai saat ini apakah masih baik untuk digunakan atau tidak.

Pada penelitian ini, peneliti mengukur implementasi program tersebut menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam Rusli (2015:105) yang melihat suatu kebijakan publik ditentukan oleh enam variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, diantaranya: Standar dan

Sasaran Kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar Badan Pelaksana, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi sosial, politik dan ekonomi serta Sikap Para Pelaksana Selain itu peneliti juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Adapun kerangka berpikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 3. Kerangka Penelitian
(Diolah oleh peneliti, 2019)

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif karena peneliti mencoba menggambarkan keadaan serta obyektif yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya, mengenai proses implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan tentang suatu keadaan secara obyektif dengan menggunakan prosedur penelitian yang bersifat deskriptif yang datanya berupa kata-kata tertulis dan gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen. Sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) yang menyatakan tipe penelitian kualitatif berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus

lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Moelong (2011:93), masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Adapun fokus masalah mengenai implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, diantaranya adalah:

1. Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dengan menggunakan variabel implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yaitu:
 - a. Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran program merupakan kejelasan ukuran kebijakan Program Pamsimas dan ukuran keberhasilan Program Pamsimas.
 - b. Sumber daya
Sumber daya yang dimaksud merupakan kondisi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Pamsimas dan kondisi sumber daya finansial pelaksanaan Program Pamsimas.
 - c. Komunikasi Antar Badan Pelaksana
Komunikasi antar badan pelaksana merujuk pada komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pamsimas di Desa Kebagusan yaitu Dinas Cipta Karya Kabupaten Pesawaran, Dinas

Kesehatan dalam hal ini menunjuk Puskesmas Bernung, dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup peran dalam masing-masing organisasi pelaksana Program Pamasimas.

e. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

- 1) Kondisi sosial atau masyarakat pada umumnya dan dukungan masyarakat terhadap Program Pamsimas
- 2) Kondisi ekonomi masyarakat sekitar lokasi pelaksanaan Program Pamsimas dan pengaruh terhadap pelaksanaan Program.
- 3) Kondisi politik merupakan dukungan pemerintah desa Kebagusan dengan adanya Program Pamsimas di Desa Kebagusan.

f. Sikap Para Pelaksana

- 1) Antusias dan respon Pelaksana terhadap Program Pamsimas
- 2) Kognisi, pemahaman Pelaksana terhadap Program Pamsimas
- 3) Intensitas sikap para pelaksana, preferensi nilai yang dimiliki para pelaksana Program Pamsimas.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yaitu Sumber Daya Alam dan Sikap Masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan karena sejak

masuknya Program Pamsimas ini tidak semua masyarakat Desa Kebagusan dapat menikmati kehadiran program Pamsimas tersebut. Program Pamsimas di Desa Kebagusan sudah berjalan sejak tahun 2017 akan tetapi sampai sekarang sebagian masyarakat desa Kebagusan masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Selain itu alasan peneliti memilih lokasi ini karena Desa Kebagusan menduduki peringkat pertama penduduk miskin diwilayah kerja Puskesmas Bernung.

D. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Adapun data primer yang digunakan peneliti dalam memperoleh data yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para narasumber. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah Kepala Desa Kebagusan, Ketua KKM Desa Kebagusan, Sanitarian Puskesmas desa Kebagusan, Kasatker Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pesawaran, dan beberapa masyarakat Desa Kebagusan. Kemudian data sekunder peneliti menggunakan dokumentasi berupa dokumen seperti peraturan perundangan, pedoman umum dan petunjuk teknis program Pamsimas, kegiatan, foto dan berita media yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan penelitian yang tepat dan akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono (2011:194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Terkait penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa informan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. Informan Terkait Implementasi Program Pamsimas

No	Keterangan	Jabatan	Tanggal Wawancara
1.	Aprizal Sani, ST.MM	Kepala Satuan Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	26/08/2019
2.	Rifki Dayan, SE	Fasilitator Bidang Keuangan Kabupaten Pesawaran	6/09/2019
3.	Tohir, SE	Kepala Desa Kebagusan	04/09/2019
4.	Fitrah, ST	Ketua Kelompok Keswadayan Masyarakat Desa Kebagusan	20/08/2019
5.	Ariyani, Amd.Kl	Sanitarian Puskesmas	24/08/2019
6.	Tri	Masyarakat Desa Kebagusan	29/08/2019
7.	Aan	Masyarakat Desa Kebagusan	29/08/2019

(Sumber : diolah oleh Peneliti, 2019)

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan terhadap kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Adapun objek yang diamati peneliti yakni proses pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan penelitian. Studi ini merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data-data yang dapat dijadikan informasi yaitu data-data dan dokumen-dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan implementasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dimiliki oleh pengurus Program Pamsimas desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Dokumen penunjang penelitian yang diperoleh peneliti yaitu Buku Pedoman Umum Program Pamsimas, Foto-foto pada saat proses pelaksanaan Program Pamsimas di Desa Kebagusan.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:34), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data yang diperoleh peneliti dilapangan kemudian dipilih melalui reduksi data sehingga didapatkan data yang berfokus dan berhubungan dengan penelitian atau tidak. Dalam penelitian ini proses mereduksi data dilakukan dengan memilih serta menyeleksi data yang dibutuhkan dalam penelitian pelaksanaan Program Pamsimas dan mana yang bukan. Kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini, penyajian data yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dengan mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara dengan informan yang kemudian didukung oleh dokumen-dokumen, table data, foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap

awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini pengambilan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari serangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dikatakan valid atau sah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Kredibilitas Data (*Credibility*)

Uji kredibilitas data mempertunjukkan bahwa hasil-hasil penemuan dapat dibuktikan dengan cara peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Untuk menguji kredibilitas, peneliti melakukan:

a. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Mathinson dalam Sugiyono (2016:332-333), nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh secara meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Terdapat 3 macam triangulasi dalam menentukan keabsahan data yaitu: (1) Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda; (2) Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi atau kuesioner; (3) Triangulasi waktu, dalam melakukan kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan melalui derajat kepercayaan dengan menggunakan cara triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana yang berbeda dan mana yang spesifik. Informan tersebut berasal dari Kepala Desa Kebagusan, Ketua KKM Desa Kebagusan, Sanitarian Puskesmas desa Kebagusan, Kasatker Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pesawaran, dan beberapa masyarakat Desa Kebagusan. Observasi yang dilakukan pada saat peneliti turun ke lapangan, serta berbagai dokumentasi yang didapatkan dari berasal dari lokasi penelitian.

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan menguji sewaktu diadakan analisis atau penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature buku,

arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis penafsiran data.

2. Teknik Pengujian Keteralihan Data (*Transferability*)

Pengujian ini berkaitan dengan sampai mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. *Transferability* akan tercapai apabila pembaca memperoleh gambaran yang semakin jelas. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menyajikan laporan yang sedemikian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (*Dependability*)

Menurut Sugiyono (2011:374), dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, akan tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya dan untuk mengecek apakah hasil penelitian yang dilakukan peneliti benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

4. Teknik Kepastian Data (*Confirmability*)

Teknik pengujian kepastian data (*confirmability*) dilakukan untuk mengetahui proses penelitian, sehingga tidak memunculkan penelitian yang hanya ada hasilnya tetapi tidak ada proses penelitian. Dalam pengujian kepastian data sama halnya dengan uji kebergantungan sehingga prosesnya dilakukan melalui pengujian hasil penelitian oleh dosen pembimbing serta dosen pembahas. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang “Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Pesawaran (Studi di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan)” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pamsimas di Desa Kebagusan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena dalam pelaksanaan Pamsimas sasaran program belum sepenuhnya tercapai, karena pada implementasi yang sudah berjalan sampai saat ini peneliti menemukan bahwa:
 - a. Tidak seluruh lapisan masyarakat desa kebagusan terlayani kebutuhan air bersihnya dimana yang terlayani hanya dusun Sidototo saja.
 - b. Masyarakat masih melakukan aktifitas buang air besar sembarangan.Kemudian pada indikator kondisi sosial dimana tidak semua masyarakat desa kebagusan mau berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan baik tenaga kerja maupun iuran uang.
2. Hambatan yang ditemukan dalam pengimplementasian Program Pamsimas di Desa Kebagusan yaitu terdapat faktor penghambat diantaranya hambatan internal dan external. Hambatan internal dalam hal ini sumber daya manusia dimana dalam memilih Ketua KKM merupakan hal yang tidak mudah karena

di desa sasaran program yang lain ditemukan korupsi dana pamsimas yang dilakukan oleh ketua KKM desa dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program mayoritas dusun yang menjadi titik penampungan air minum saja. Selain itu hambatan eksternal dalam hal ini Sosial Kultural atau kebiasaan masyarakat dimana masih melakukan buang air besar sembarangan dan Faktor geografis desa yang merupakan desa kesulitan air, dalam mencari lokasi penampungan air bersihnya tidak mudah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas adapun saran yang diberikan peneliti terkait implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Pesawaran (Studi di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan) yaitu:

1. Perlu adanya penambahan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di dusun lain agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati kehadiran program Pamsimas.
2. Agar Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa tentang denda (Punishment) bila masih ada masyarakat yang melakukan BAB sembarangan.
3. Agar pemerintah memilih kader desa untuk dilatih aktif menyadarkan masyarakat akan rasa malu jika melakukan BAB sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CVAlfabeta.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.

Ratmiko, Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta : PustakaPelajar.

Riggs, Fred W. 2005. *Administrasi Negara-negara Berkembang- Teori Masyarakat Prismatic*. Jakarta : PT Rajawali.

Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Resonsif*. Bandung: CV. ADOYA Mitra Sejahtera.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suharno. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian, Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Skripsi dan Jurnal:

Aslamiyah, Haryono dan Rozikin. 2014. *Model Partnership Sebagai Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Air Bersih (Studi terhadap Public Private Partnership di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gersik)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No. 1, Hal. 89-94.

Chaerunnissa, Chika. 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Brebes (Studi*

Kasus Desa Legok dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung).
Jurnal Vol. 5 No. 2. Universitas Diponegoro Semarang.

Kornelius dan Firman. 2016. *Analisis Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Pengembangan Sumber Daya Masyarakat*. Jurnal Vol. 5 No. 2. Universitas Tribuhwana Tunggaladewi.

Maharani, Nora. 2015. *Hubungan Pelaksanaan Program Pamsimas dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat (Studi di Desa Merpang Kecamatan Agung Kabupaten Oku Selatan Sumatera Selatan)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Lampung.

Mordani, Jamzi. 2014. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Risma dan Rudi. 2016. *Community Driven Development dalam Implementasi CSR oleh PT. Pertamina Subang*. Jurnal Vol. 8 No.2. Universitas Padjajaran.

Ruari, Irlan. 2017. *Implementasi Program Rumah Sakit Keliling pada Daerah Operasional Kabupaten Pesisir Barat*. Skripsi. Program Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung.

Salbiah. 2015. *Implementasi Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Warna Ungu Bagian Khazanah Lokal Paser*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman. 3 (1) : 177-189.

Sander, M. A., 2005. *Hubungan Faktor Sosio Budaya dengan Kejadian Diare di Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Sidoarjo*. Jurnal Medika. Vol 2. No.2. Juli-Desember 2005: 163-193

Dokumen Lain:

Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 195 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program Pamsimas

Website:

<https://www.suara.com/health/2018/11/23/162639/ada-334-juta-penduduk-indonesia-kekurangan-air-bersih> diakses pada 18 Maret 2019, pukul 20.00 WIB.

<http://www.lampost.co/berita-provinsi-lampung-targetkan-akses-sanitasi-100-di-2019.html> diakses pada 15 Maret 2019, pukul 19.30 WIB.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1097/5/121801025_file%205.pdf diakses pada 12 Agustus 2019, pukul 20.30 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/7156/13/BAB%20II.pdf> diakses pada 12 Agustus 2019, pukul 20.30 WIB